



Indonesia
Corruption
Watch

LAPORAN PENELITIAN

Pengadaan Barang/Jasa Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Sorong Selatan



Disusun Oleh:

Belantara Papua
Harmoni Alam Papua (Harapan)
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPra)

2021

Diterbitkan oleh:



Indonesia Corruption Watch
4 Maret 2022

Penulis:

- Almas Sjafrina
- Dewi Anggraeni

Tim Peneliti:

Belantara Papua

- Johanna Kamesrar
- Nataniel F. Ch.
- Max Binur
- Zeth Simson

Harmoni Alam Papua (Harapan)

- Harri Sugiyanto Tajemu
- Joseph Ngamel
- Maria Magdalena Kendy
- Petrus Alberth Dewantoro Talubun
- Rafael Matheus Yolmen

Indonesia Corruption Watch (ICW)

- Almas Sjafrina
- Dewi Anggraeni

Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa)

- Edizon Hoor
- Irianto Jacobus
- M Adrian Palege



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR SINGKATAN	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1 Pengantar	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Waktu Penelitian	5
1.5 Pengumpulan Data	6
1.5.1 Penelusuran Online	6
1.5.2. Permohonan Informasi	6
1.5.3. Wawancara dan FGD dengan Pemerintah Daerah	6
1.5.4. Observasi lapangan	7
1.5.5. Multistakeholder Meeting	7
BAB II. TRANSPARANSI DAN PEMANFAATAN HASIL PBJ	7
2.1 Transparansi PBJ	8
2.2 Strategi Pemerintah Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan Penggunaan Anggaran dan Menginformasikan PBJ	9
2.3 PBJ Sektor Pendidikan	10
2.3.1 Sorong Selatan	12
2.3.2. Kabupaten Jayapura	15
2.3.3. Kabupaten Merauke	17
2.4. PBJ Sektor Kesehatan	19
2.4.1. Kabupaten Jayapura	19
2.4.2. Kabupaten Merauke	21
2.4.3. Kabupaten Sorong Selatan	23
BAB III. SIMPULAN DAN REKOMENDASI	26

DAFTAR SINGKATAN

AMEL	: Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal
APBD	: Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ASPAK	: Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPBJ	: Badan Pengadaan Barang/Jasa
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
CSO	: Civil Society Organization
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
DTPK	: Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar
FGD	: Focus Group Discussion
HPS	: Harga Perkiraan Sementara
ICW	: Indonesia Corruption Watch
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemendes	: Kementerian Kesehatan
KIPRA	: Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Musrenbang	: Musyawarah Rencana Pembangunan
OAP	: Orang Asli Papua
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBJ	: Pengadaan Barang/Jasa
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
Pusdatin	: Pusat Data Teknologi dan Informasi
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RUP	: Rencana Umum Pengadaan
SD	: Sekolah Dasar
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SMAN	: Sekolah Menengah Atas Negeri
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMPN	: Sekolah Menengah Pertama Negeri
SiRUP	: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
ULP	: Unit Layanan Pengadaan
YPK	: Yayasan Pendidikan Kristen

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan di wilayah Papua dan Papua Barat masih jauh dari kata maksimal. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut bahwa penduduk di wilayah Papua, utamanya Orang Asli Papua (OAP), masih memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.¹ Masalah ini kemudian melatarbelakangi penyusunan kebijakan khusus, seperti dukungan anggaran dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, sebagaimana dimandatkan dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan tak cukup dengan peningkatan alokasi anggaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar. Dibutuhkan perencanaan yang baik agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengawasan realisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Bersama dengan masyarakat, pemerintah perlu memastikan anggaran dikelola maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan PBJ betul-betul dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Problem mendasar seperti penggunaan anggaran yang kerap disusun tidak partisipatif dan menjamurnya korupsi PBJ perlu diantisipasi.

Meski telah diterapkan penggunaan teknologi informasi untuk transparansi dan akuntabilitas, perilaku koruptif dalam proses PBJ masih kerap terjadi. Hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terhadap penindakan kasus korupsi sepanjang 2019 menemukan bahwa 64,2% dari 271 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum merupakan korupsi PBJ.² Kerugian negara akibat korupsi tersebut bahkan mencapai Rp 957,3 miliar dan suap Rp 91,5 miliar. Selain kerugian negara, korupsi PBJ tentunya juga berdampak pada pelayanan untuk masyarakat.

Korupsi PBJ juga tak memandang sektor. PBJ pendidikan dan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar pun tak lepas dari korupsi. Masalah ini berkorelasi langsung pada buruknya kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dalam banyak kasus, korupsi PBJ pelayanan publik ini merugikan masyarakat secara langsung dan bahkan membahayakan. Misalnya, kualitas gedung sekolah yang buruk dapat berpotensi ambruk dan mengancam nyawa siswa yang sedang belajar.

¹ Bappenas, *Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua-Papua Barat* (link: <https://deskpapua.bappenas.go.id/tentang-kami>), diakses pada 30 Mei 2021 (15:40 WIB).

² Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019* (link: https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf), diakses pada 27 April 2021 (12:40 WIB).

Korupsi PBJ umumnya terjadi karena dibajaknya pengadaan, baik oleh penyelenggara negara yang terkait didalamnya maupun rekanan penyedia barang dan jasa, untuk mengeruk keuntungan yang tidak semestinya. Modus yang kerap muncul yaitu suap, mark-up anggaran, pengadaan fiktif, dan gratifikasi. Transparansi dan persaingan pengadaan yang sehat menjadi isu yang perlu terus diupayakan dalam PBJ.

Sehubungan dengan krusialnya peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan di wilayah Papua dan masih maraknya masalah dalam PBJ, ICW melakukan penelitian untuk mengetahui penilaian masyarakat terkait partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas PBJ. Penelitian dilakukan di Kabupaten Jayapura, Sorong Selatan, dan Merauke bersama dengan jaringan, yaitu Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa), Harmoni Alam Papua, dan Belantara Papua. Sektor pendidikan dan kesehatan dipilih sebagai fokus penelitian. Sektor ini dipilih karena merupakan pelayanan dasar yang akses pelayanannya di wilayah Papua masih sangat terbatas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menyusun penggunaan anggaran dan PBJ sektor pendidikan dan kesehatan yang partisipatif dan transparan?
2. Bagaimana hasil dan pemanfaatan PBJ sektor pendidikan dan kesehatan yang penerima manfaatnya adalah masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip partisipatif dan transparan dalam PBJ sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Sorong Selatan. Selain itu, melalui penelitian ini juga diidentifikasi masalah pemanfaatan hasil PBJ oleh penerima manfaat. Penelitian ini dilengkapi dengan rekomendasi pembenahan PBJ agar PBJ kedepannya dapat lebih sesuai kebutuhan penerima manfaat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Dalam konteks memajukan pelayanan pendidikan dan kesehatan, identifikasi masalah dalam penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan PBJ. Tak hanya bagi pemerintah daerah, temuan dan rekomendasi penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* terkait PBJ. Seperti misalnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP) untuk mengevaluasi implementasi pemanfaatan platform SPSE.

1.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan, yaitu mulai Juni hingga Oktober 2021. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data PBJ secara online di LPSE masing-masing kabupaten pada 14-25 Juni 2021 dan dilanjutkan dengan permohonan informasi, wawancara, dan observasi lapangan pada Juli hingga Oktober 2021.

1.5 Pengumpulan Data

1.5.1 Penelusuran Online

ICW mengawali pengumpulan data dengan menginventarisir data PBJ di LPSE dan melengkapinya dengan informasi pengadaan yang tersedia di Opendender.net, situs pemantauan PBJ yang ICW kembangkan. Pengumpulan data ini dilakukan pada 14-25 Juni 2021 dan diperbarui pada 11-20 Oktober 2021. Data PBJ ini terbatas pada SKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan RSUD sebagai pelaksana PBJ.

ICW kemudian memilah penerima manfaat pengadaan tersebut pada dua kategori, yaitu publik (pasien, murid, pengguna jalan, dll) dan pemberi layanan (ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dll). Tujuan utama dari pemilahan ini yaitu untuk menentukan PBJ yang akan diobservasi melalui penelitian lapangan. PBJ yang diobservasi hasilnya di lapangan yaitu PBJ dengan publik sebagai penerima manfaatnya.

1.5.2. Permohonan Informasi

Data PBJ di LPSE sangat minim dan menunjukkan SKPD Dinas Pendidikan dan Kesehatan di 3 daerah belum mempublikasikan seluruh pengadaan. Dokumen anggaran yang semestinya dipublikasikan secara serta merta juga belum tersedia di website resmi pemerintah daerah. ICW yang pada tahap ini sudah membangun kerja sama dengan mitra di 3 daerah penelitian mengajukan permohonan informasi resmi.

Dokumen informasi yang dimohon yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017-2020; Perda APBD 2017-2020; serta PBJ dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan 2017-2020. Permohonan informasi disampaikan kepada instansi pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan penguasaan dokumen informasi, yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengadaan Barang/ Jasa (BPBJ), Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Dari proses ini diketahui bahwa pemda di 3 daerah penelitian belum mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) daerah. Permohonan informasi pun disampaikan kepada masing-masing instansi. Namun, hingga penelitian selesai dilakukan, informasi yang dimohon belum dipenuhi.

1.5.3. Wawancara dan FGD dengan Pemerintah Daerah

Untuk menjelaskan maksud permohonan informasi dan agenda penelitian kepada pemda, tim peneliti menyelenggarakan FGD dengan perwakilan pemda dan OPD Kabupaten Jayapura dan Merauke. FGD hanya dilakukan di Jayapura dan Merauke secara daring karena Pemda Sorong

Selatan tidak berhasil dihubungi. Tim peneliti juga berupaya mewawancarai pemda, khususnya dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan.

1.5.4. Observasi lapangan

Observasi hasil PBJ dilakukan pada 14 Agustus hingga 8 Oktober 2021. Penentuan lokasi didasarkan pada sejumlah indikator, yaitu:

1. Sebaran wilayah
2. Akses menuju lokasi PBJ
3. PBJ yang mencantumkan lokasi di deskripsi proyek
4. Skor kerentanan pengadaan terhadap korupsi yang tersedia di Opentender.net
5. Nilai kontrak pengadaan

Selain mengobservasi hasil PBJ, dilakukan pula wawancara dengan penerima manfaat dan masyarakat sekitar. Wawancara berfokus pada pelibatan penerima manfaat dalam perencanaan pembangunan dan PBJ, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan PBJ, dan pengawasan PBJ.

1.5.5. Multistakeholder Meeting

Multistakeholder meeting diadakan untuk memperdalam dan memperkaya temuan sementara penelitian dan meminta klarifikasi atau tanggapan dari pemerintah daerah dan CSO/kelompok masyarakat.

BAB II.

HASIL PEMANTAUAN: PERENCANAAN, TRANSPARANSI, DAN PEMANFAATAN HASIL PBJ

2.1 Transparansi PBJ

PBJ sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 tahun 2018 tentang PBJ diantaranya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, terbuka, dan akuntabel. Prinsip tersebut diimplementasikan sejak tahap perencanaan dengan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). RUP dan perubahannya diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) setelah penetapan alokasi anggaran belanja.

Meski diwajibkan, belum semua RUP telah diumumkan dalam SiRUP. LKPP menyebut bahwa pada 2017-2020, pengadaan yang diumumkan baru Rp 860 triliun atau dengan proporsi rata-rata terhadap belanja PBJ sebesar 79,1%. Terdapat 20,9% PBJ tidak diumumkan di SiRUP.³ Rencana pengadaan yang diumumkan sebelum tahun anggaran berjalan pun disebut hanya 10% untuk periode yang sama. Hal ini berdampak pada terhambatnya penyampaian informasi atau keterbukaan pengadaan, baik kepada para pelaku usaha maupun masyarakat.

Selain RUP, pemerintah seharusnya mempublikasikan realisasi RUP. LKPP sejak 2011 telah mengembangkan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tidak hanya proses pengadaan yang dilakukan secara elektronik, pengadaan yang masih manual pun semestinya diinput dalam sistem tersebut oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sehingga, masyarakat dapat mengetahui informasi pengadaan melalui website LPSE lembaga/pemerintah daerah.

Faktanya, informasi pengadaan yang dapat diakses masyarakat di website LPSE masing-masing pemda masih terbatas. Besar dugaan, pengadaan yang terealisasi jauh lebih banyak dari yang dipublikasikan. Diakses pada 14-25 Juni 2021 dan diperbarui pada 11-20 Oktober 2021, informasi pengadaan sektor pendidikan dan kesehatan di LPSE Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Sorong Selatan 2017-2020 hanya ditemukan sebanyak:

Tabel 1.
Jumlah PBJ Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Dengan Metode Tender Tahun 2017-2020

Daerah (Kabupaten)	Sektor	Pengadaan	
		Jumlah	Anggaran (Rp)
Sorong Selatan	Pendidikan	19	14.536.446.000,-
	Kesehatan	16	80.462.183.995,-
Jayapura	Pendidikan	25	30.554.153.165,-
	Kesehatan	33	44.396.306.200,-
Merauke	Pendidikan	0	13.872.993.948,-
	Kesehatan	13	147.791.677.468,-

³ Surat Edaran LKPP No. 30 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengumuman RUP Melalui SiRUP Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Di situs Opentender ICW yang datanya bersumber dari INAPROC, data pengadaan yang tersedia justru lebih banyak. Sebagai contoh, data pengadaan sektor pendidikan di Kabupaten Merauke di Opentender tahun 2017-2020 tercatat sebanyak 19 dan sektor kesehatan sebanyak 96 pengadaan. Tidak diketahui pasti, apa yang menyebabkan perbedaan data tersebut, mengingat data INAPROC bersumber dari LPSE masing-masing lembaga atau pemerintah daerah. Namun dari penelusuran lapangan terhadap pengadaan yang tercantum dalam Opentender tapi tidak tercantum dalam LPSE, pengadaan tersebut betul-betul terlaksana.

2.2 Strategi Pemerintah Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan Penggunaan Anggaran dan Menginformasikan PBJ

Penggunaan anggaran daerah setiap tahun umumnya didasarkan pada 4 hal, yaitu:

1. Hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kampung, kecamatan, dan kabupaten yang berujung pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana pembangunan daerah beserta visi dan misi kepala daerah.
3. Sistem pendataan skala nasional yang dikelola secara terpadu, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk sektor pendidikan dan Sistem Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) untuk sektor kesehatan.
4. Aspirasi warga yang disampaikan melalui anggota legislatif daerah.

Dengan musrenbang dan aplikasi pendataan, perencanaan anggaran dan pembangunan semestinya sudah disusun partisipatif dan sesuai kebutuhan warga. Namun, penggunaan anggaran yang tak sesuai kebutuhan masih kerap ditemukan. Sebaliknya, masih ada pula kebutuhan warga yang bersifat mendasar dan mendesak luput dari alokasi anggaran.

Warga di 3 daerah penelitian menuturkan bahwa musrenbang sudah secara rutin. Namun, tak semua warga yang berkepentingan mengetahui dan terlibat dalam forum tersebut. Hal lain yang dikeluhkan warga adalah tindak lanjut dari usulan yang disampaikan melalui musrenbang. Warga berharap ada informasi lebih lanjut, apakah usulan yang telah disepakati dalam musrenbang diterima/tidak dan kapan direalisasikan. Sebagai contoh, usulan warga untuk pembangunan sarana air bersih di Kampung Bariat, Sorong Selatan, yang disebut telah diusulkan bertahun-tahun melalui musyawarah distrik.⁴ Demikian pula usulan pembangunan talud penyangga sekolah di Kampung Ayapo, Jayapura. Setelah 6 tahun diusulkan, talud tersebut baru dibangun pada 2019.⁵

Meski demikian, terdapat praktik baik yang dapat diadopsi. Di Merauke, terdapat mini lokakarya puskesmas per bulan dan pertemuan lintas sektor yang mempertemukan kepala distrik, kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan masyarakat. Pertemuan ini menjadi forum penyampaian evaluasi kinerja puskesmas dan pengusulan PBJ. Terdapat pula forum keluarga besar Distrik Ulilin, Merauke, yang diselenggarakan setiap 6 bulan sebagai upaya monitoring proses pembangunan dan pelayanan publik.

⁴ Disampaikan dalam forum diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Belantara Papua di Kampung Bariat pada 16 Agustus 2021.

⁵ Disampaikan oleh kepala kampung dan perwakilan warga Kampung Ayapo yang menghadiri multistakeholder meeting yang ICW adakan di Sentani, Jayapura, pada 18 Oktober 2021.

Diselenggarakan atas inisiatif kepala distrik, forum ini mempertemukan pemerintah distrik, kader kesehatan dan pendidikan, keamanan, perusahaan, dan masyarakat.

Untuk kebutuhan sekolah dan fasilitas kesehatan, aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat seharusnya dapat menjadi basis data PBJ yang valid. Namun, penelitian ini menemukan tiga masalah, yaitu:

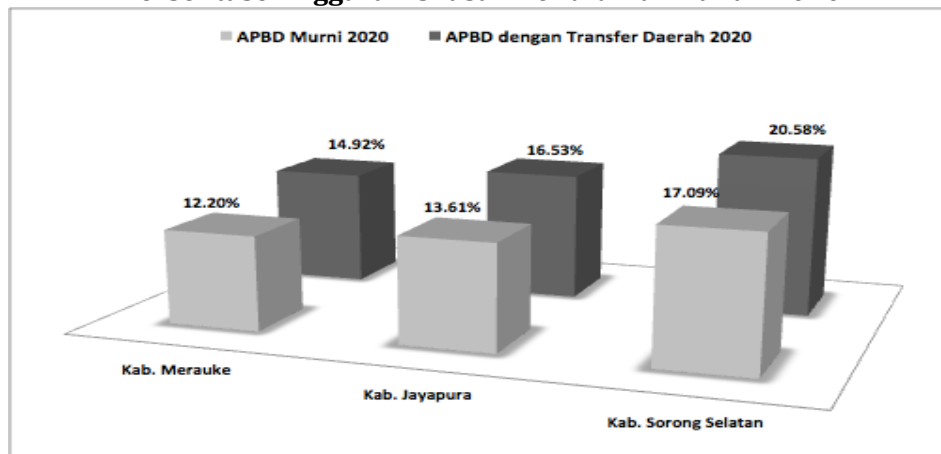
1. Terdapat PBJ tidak sesuai kebutuhan sekolah sehingga tidak bermanfaat, seperti pembangunan laboratorium Fisika di SMPN 1 Haha, Sorong Selatan. Selain tidak sesuai kebutuhan, laboratorium tidak dilengkapi peralatan yang dibutuhkan.
2. Kondisi sekolah dalam situs Sekolah Kita yang dikembangkan oleh Tim Dapodik Kemendikbud tak sepenuhnya valid. Sebagai contoh, terdapat sekolah yang diobservasi tercatat mempunyai 6 ruang kelas berkondisi baik. Padahal, hanya terdapat 3 ruang kelas berkondisi baik dan 3 ruang kelas mangkrak di sekolah tersebut.
3. Terdapat masalah mendasar mengenai kemampuan operator sekolah dalam mengoperasikan dapodik dan buruknya akses internet.

Oleh karena itu, sistem pendataan ini perlu terus disertai peningkatan. **Pertama**, peningkatan pengecekan validasi data, baik *by sistem* maupun manual dengan melakukan observasi kondisi sekolah dan puskesmas. Di Kabupaten Jayapura terdapat forum sinkronisasi antara dinas kesehatan dan puskesmas untuk verifikasi usulan ASPAK. Dilakukan setiap Oktober atau November, forum ini dinilai cukup efektif untuk pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan. **Kedua**, peningkatan kapasitas operator sekolah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan. **Ketiga**, pemerataan akses listrik dan internet.

2.3 PBJ Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang mendapat alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan ini telah diatur, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD), Kabupaten Jayapura, Sorong Selatan, dan Merauke pada 2020 mengalokasikan anggaran urusan pendidikan jauh di bawah 20% dari total belanja APBD murninya.

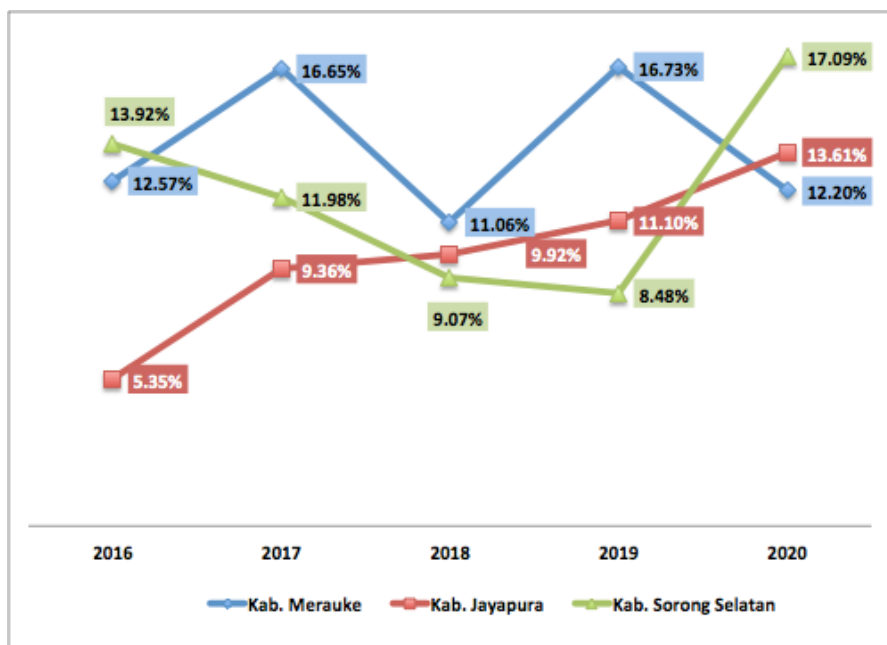
Grafik 1.
Persentase Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2020



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2020

Selain pemenuhan alokasi minimal, konsistensi peningkatan anggaran penting diperhatikan. Hanya Kabupaten Jayapura yang anggaran pendidikannya konsisten naik (grafik 2), meski tak signifikan dan jauh dari alokasi minimal 20%.⁶ Anggaran pendidikan di Merauke masih fluktuatif dari tahun ke tahun dan pada 2020 mengalami penurunan signifikan hingga hanya 12,2% dari APBD murni. Sedangkan anggaran pendidikan Sorong Selatan pada 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari hanya 8,48% pada 2019 menjadi 17,09% pada 2020. Melihat tren alokasi anggaran ini, besar dugaan anggaran pendidikan 2021 tak jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 2.
Tren Persentase Anggaran Urusan Pendidikan dari APBD Murni 2016-2020



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2020

Masih belum tercapainya minimal alokasi anggaran untuk urusan pendidikan sangat disayangkan. Pelayanan pendidikan di ketiga daerah tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan. Pada 2020, tercatat masih banyak ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang dan berat di ketiga daerah, yaitu 957 ruang kelas, mulai dari ruang kelas di satuan pendidikan tingkat PAUD hingga SMA/SMK.⁷

Selain alokasi anggaran, hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana anggaran direalisasikan. Dari 214 informasi pengadaan yang tersedia di LPSE dan Opendender, ditelusuri 22 pengadaan. Berikut temuan dari penelusuran pengadaan sektor pendidikan:

⁶ Kemendikbudristek, *Neraca Pendidikan Daerah 2020* (link: <https://npd.kemdikbud.go.id/>), diakses pada 28 Februari 2022 (14:20 WIB)

⁷ Ibid 6.

2.3.1 Sorong Selatan

Data pengadaan sektor pendidikan di LPSE Sorong Selatan 2017-2020 sangat minim. Hanya ada 19 informasi tender pengadaan dengan anggaran Rp 14.536.446.000,-. Berangkat dari pengadaan tersebut kemudian dilakukan penelusuran 4 proyek pengadaan infrastruktur yang terletak di Distrik Seremuk, Saifi, dan Teminabuan. Tim peneliti juga menelusuri infrastruktur pendidikan di 3 kampung di distrik lain, yaitu di Kampung Bariat, Distrik Konda, serta Kampung Tofot dan Kampung Unggi, Distrik Wayer. Pemilihan lokasi pengadaan yang ditelusuri ini didasari pada pertimbangan ketersediaan data pengadaan di LPSE dan sebaran wilayah.

Asumsi awal dari penelusuran ini, PBJ di ibukota kabupaten hasilnya lebih baik dibanding di distrik yang berlokasi jauh dari ibukota kabupaten. Sebab, pengadaan di daerah ibukota kabupaten atau pusat pemerintahan akan lebih mudah diawasi. Distrik Teminabuan merupakan ibukota Sorong Selatan yang berdekatan dengan Distrik Konda. Sedangkan distrik lainnya, seperti Distrik Saifi, berlokasi cukup jauh. Butuh waktu tempuh 2-3 jam dengan menggunakan kendaraan khusus karena kondisi jalan yang rusak.

Tabel 2.
Pengadaan dan Pelayanan Pendidikan
di Sorong Selatan yang Ditelusuri

No.	Nama Pengadaan	Lokasi	Tahun	Anggaran (Rp)	Penyedia
1	Pembangunan 3 ruang kelas baru (RKB) SD YPK Mlaswat	Distrik Saifi	2018	489.353.000,00	CV Putra Zoarollo
2	Pembangunan laboratorium Fisika beserta perabotnya SMPN 1 Haha	Distrik Seremuk	2019	630.115.426,93	CV Citra Mandiri
3	Pembangunan laboratorium Fisika beserta perabotnya SMP An-Nur	Distrik Teminabuan	2019	623.882.621,68	Mitra Papua Sejahtera
4	Pembangunan lanjutan 6 RKB SMPN 1 Teminabuan	Distrik Teminabuan	2018	802.748.000,00	CV Surya Fajar
5	PAUD dan SD di Kampung Bariat	Distrik Konda	-	-	-
6	PAUD dan SD di Kampung Tofot	Distrik Wayer	-	-	-
7	SD YPK Unggi	Distrik Wayer	-	-	-

Berdasarkan penelusuran atas pengadaan di tabel 2, ditemukan 4 persoalan pengadaan di Sorong Selatan.. **Pertama**, pengadaan di distrik yang berlokasi jauh dari pusat pemerintahan banyak bermasalah, mulai dari pembangunan infrastruktur tidak dilengkapi prasarana pendukung hingga mangkrak. Hasil pengadaan ini berbeda dengan pengadaan di Distrik Teminabuan. Pengadaan di distrik pusat tersebut tidak mempunyai masalah berarti dari sisi kualitas dan kelengkapan. Laboratorium Fisika di SMP An-Nur sudah selesai dibangun dan dilengkapi peralatan. Demikian pula pembangunan 6 ruang kelas baru di SMPN 1 Teminabuan.

Sebaliknya, laboratorium Fisika di SMPN 1 Haha belum dapat digunakan. Bangunan sudah rampung, tapi belum dilengkapi peralatan dan meubelair. Menjadi pertanyaan, mengapa laboratorium di SMP An-Nur dilengkapi peralatan, tetapi di SMPN 1 Haha tidak? Padahal, pengadaan dilakukan dengan nama proyek sama, di tahun yang sama, dan nilai kontraknya juga nyaris sama, yaitu Rp 623 juta untuk SMP An-Nur dan Rp 630 untuk SMPN 1 Haha.

Dalam PBJ, bangunan dan peralatan lab memang diadakan secara terpisah. Namun, menjadi pengetahuan umum bahwa pembangunan ruangan hanya akan dapat digunakan apabila dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan. Belum ada informasi pengadaan peralatan laboratorium, baik untuk SMP An-Nur maupun SMPN 1 Haha di LPSE. Pihak sekolah menjelaskan belum ada informasi pengadaan peralatan laboratorium sehingga ruangan tersebut sementara ini dijadikan tempat penyimpanan meja kursi yang tidak terpakai.⁸

Temuan serupa terjadi di pengadaan ruang kelas SMPN 1 Teminabuan dan SD YPK Mlaswat, Distrik Saifi. Ruang kelas baru di SMPN 1 Teminabuan telah selesai dan dapat digunakan. Sedangkan ruang kelas di SD YPK Mlaswat tampak mangkrak. Bangunan belum dilengkapi plafon, ubin, dan meubelair. Dinding ruangan juga belum dicat. Padahal, pengadaan dilakukan pada 2018. Proyek senilai Rp 489,35 untuk 3 ruang kelas baru tersebut dimenangkan oleh CV Putra Zoarollo. Ditelusuri di Opentender.net, perusahaan ini belum tercatat memenangkan proyek pemerintah, baik di Sorong Selatan maupun di daerah lain.

Wali murid dan pihak sekolah kecewa atas mangkraknya pembangunan 3 ruang kelas di SD YPK Mlaswat. SD ini baru mempunyai 3 ruang kelas. Sekolah ini bahkan belum mempunyai kantor guru dan perpustakaan. Pengawas yang tim peneliti temui di sekolah mengaku bahwa pihaknya tidak banyak mengetahui informasi pembangunan fisik sekolah, melainkan hanya memiliki data rekap pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan berjalan tanpa pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana seharusnya.

Pembangunan ruang kelas mangkrak juga ditemukan di Kampung Bariat, Konda. Dalam FGD bersama warga dan pengurus distrik, warga menyebut bahwa pada 2016 dilakukan pembangunan PAUD. Sampai FGD dilakukan, yaitu pada Agustus 2021, ruangan PAUD belum dilengkapi dengan ubin, plafon, jendela, pintu, dan meubelair. Aktivitas PAUD akhirnya masih dilaksanakan di bangunan serba guna bekas gereja. Bangunan ini tak layak untuk dijadikan

⁸ Berdasarkan wawancara dengan salah satu aparaturnya SMPN 1 Haha pada Oktober 2021 di SMPN 1 Haha

tempat belajar, sebab masih berdingg gabah dan beratap daun. Warga setempat mengaku sudah menyampaikan masalah ini di musrenbang, tetapi belum ada penyelesaian bangunan.

Kedua, terdapat pengadaan yang tidak sesuai dengan usulan maupun kebutuhan sekolah/penerima manfaat. Pembangunan infrastruktur pendidikan seharusnya didasarkan pada data sarana dan prasarana sekolah yang diinput operator sekolah dalam Dapodik. Dari pendataan tersebut, Kemendikbudristek dan dinas pendidikan dapat mengetahui ketersediaan dan kondisi sekolah. Dengan begitu, anggaran pendidikan yang pada dasarnya terbatas dapat diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan prioritas sekolah.

Laboratorium Fisika yang dibangun di SMPN 1 Haha juga bukan merupakan usulan sekolah. SMPN 1 Haha telah mempunyai 2 ruang laboratorium yang juga belum terpakai, yaitu ruang laboratorium biologi dan komputer. Persoalannya sama, laboratorium belum dilengkapi dengan peralatan. Menurut keterangan pihak sekolah, laboratorium tersebut dibangun pada 2017-2018. Tanpa komputer, bagaimana laboratorium komputer dapat dimanfaatkan? Berbicara kebutuhan, sekolah ini lebih membutuhkan pengadaan peralatan lab biologi dan komputer beserta meubelairnya agar dapat digunakan.

Pembangunan laboratorium juga tidak disosialisasikan kepada sekolah. Sekolah baru mengetahui proyek tersebut ketika kontraktor datang dan siap membangun. Pihak sekolah menduga bahwa pengadaan ruang laboratorium ini awalnya direncanakan dibangun di sekolah di Distrik Kais. Namun dikarenakan terdapat masalah pembebasan lahan, pembangunan dialihkan ke SMPN 1 Haha. Namun berdasarkan penelusuran ICW di LPSE Sorong Selatan, tidak ditemukan informasi pengadaan kedua lab tersebut pada 2016-2018.

Ketiga, terdapat banyak kebutuhan mendesak pelayanan pendidikan yang belum diakomodir pemda Sorong Selatan. Masyarakat, tenaga pendidik di sekolah, hingga tenaga kesehatan mengeluhkan masalah sarana prasarana yang masih sangat buruk. Misalnya:

1. Masyarakat di Kampung Bariat sudah mengusulkan penyelesaian pembangunan PAUD yang masih terbengkalai sejak 2016, namun belum ada perbaikan.
2. SD YPK Sikhem Bariat mengusulkan pembangunan 3 ruang kelas baru karena sekolahnya hanya mempunyai 3 ruang kelas. Hingga tahun anggaran 2021, belum ada informasi pengadaan ruang kelas baru di sekolah tersebut. Informasi terbaru dari kepala distrik, sejak akhir Oktober 2021 tengah dibangun ruangan kantor guru dan toilet. Padahal, kebutuhan utama sekolah adalah ruang kelas baru.
3. SD YPK Unggi sama halnya dengan SD YPK Bariat juga mengusulkan pembangunan ruang guru dan 3 ruang kelas agar siswa kelas 1-6 tidak masuk sekolah bergantian.

Keempat, terdapat data kondisi sekolah di situs Sekolah Kita yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek tidak update. SMPN 1 Haha tercatat hanya mempunyai 2 laboratorium. Padahal, dengan dibangunnya laboratorium Fisika pada 2018, sekolah ini mempunyai 3 laboratorium yang ketiganya tidak dapat digunakan.⁹ SD YPK Mlaswat tertera sudah

⁹ Sekolah Kita, (69822497) SMP Negeri 1 Haha (<https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/Chome/profil/00FC45EF-8B64-4D69-91A7-534453FDE0D7>), diakses pada 17 November 2021 (14:35 WIB).

mempunyai 6 ruang kelas berkondisi baik. Realitanya, 3 ruang kelas yang baru dibangun pada 2018 mangkrak dan belum dapat digunakan.¹⁰

Demikian pula ruang kelas di SD YPK Sikhem Bariat yang tercatat mempunyai 6 ruang kelas dengan kondisi 2 baik dan 4 rusak ringan.¹¹ Dari penelusuran dalam penelitian ini, SD satu-satunya di Bariat tersebut baru mempunyai 3 ruang kelas. Dengan data yang tidak update atau keliru ini, pembangunan infrastruktur dikhawatirkan akan lebih tidak sesuai kondisi riil sekolah.

2.3.2. Kabupaten Jayapura

Pengadaan pendidikan dengan metode tender di LPSE Kabupaten Jayapura tahun 2017-2020 hanya tercatat 25 pengadaan tahun 2017-2020. Dalam penelitian ini, ditelusuri 4 pengadaan untuk diketahui hasil dan pemanfaatannya. Pengadaan tersebut yaitu:

Tabel 3.
Pengadaan Sektor Pendidikan di
Kabupaten Jayapura yang Ditelusuri

No.	Paket Pengadaan	Lokasi	Tahun	Anggaran (Rp)	Penyedia
1	Pembangunan ruang kelas & sarana penunjang relokasi SMPN 1 Sentani	Sentani	2019	8.567.100.000,-	PT Puncak Berkah
2	Pembangunan gedung sekolah SMPN 1 Sentani (lanjutan)	Sentani	2020	3.816.419.164,-	PT Puncak Berkah
3	Pembangunan ruang kelas & sarana penunjang SDN 1 Sentani	Sentani	2019	6.912.700.000,-	PT Komoden Jaya Raya
4	Pembangunan talud sekolah kampung Ayapo	Sentani	2019	1.471.236.000,-	CV Sumber Harapan Baru
5	Penyediaan buku pelajaran untuk SD dan SMP Kab. Jayapura	SDN 1 Sentani dan SMPN 1 Sentani	2017	1.467.594.000,-	CV Trifesta Utama

¹⁰ Sekolah Kita, (60401713) SD YPK Maswat, (<https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/Chome/profil/802889D2-31F5-E011-968A-678CDFBF989E>), diakses pada 17 November 2021 (15:12 WIB).

¹¹ Sekolah Kita, (69822496) SD YPK Sikhem Bariat (<https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/Chome/profil/34C00026-89CE-46AE-BC5D-D137BD8A5FA4>), diakses pada 18 November 2021 (09:40 WIB).

Dari penelusuran lapangan atas pengadaan di tabel 3, ditemukan sejumlah masalah, mulai dari perencanaan yang tidak melibatkan penerima manfaat hingga pengadaan yang belum dapat digunakan. Berikut adalah rincian dari temuan penelusuran lapangan penelitian ini.

Pertama, terdapat pihak penerima manfaat PBJ yang merasa kurang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Misalnya dalam pembangunan SDN 1 Sentani dan SMPN 1 Sentani yang direlokasi karena perluasan Bandara Sentani. Aparatur sekolah dan komite sekolah mengaku tidak dilibatkan dalam penentuan lokasi baru kedua sekolah tersebut. Meski tidak dalam konteks dimintai persetujuan, pihak sekolah berharap dimintai pertimbangan mengenai lokasi pembangunan sebelum pembangunan dimulai.

Pihak sekolah baru mengetahui lokasi baru sekolahnya ketika pembangunan sudah selesai. Lokasi baru dinilai lebih strategis karena berada di sisi jalan. Namun, lokasi tersebut dinilai cukup jauh dari sekolah lama. Hal ini akan membuat siswa-siswa perlu tambahan waktu dan ongkos menuju sekolah baru.

Menurut Ibu Yokbeth Wally, Kepala SMPN 1 Sentani, sekolah baru tersebut berjarak 3 km dari sekolah lama dan diprediksi akan menambah 3-4 kali waktu transportasi.¹² Ia mengaku tidak mempersoalkan lokasi baru dan siap direlokasi dengan catatan sekolah baru dibangun dengan sarana dan prasarana seperti sekolah lama. Di sekolah lama, SMPN 1 Sentani mempunyai 27 ruang kelas. Pernyataan tersebut selaras dengan data di situs Sekolah Kita. Kepala sekolah juga menyebut SMPN 1 Sentani telah mempunyai 3 ruang komputer. Kelengkapan tersebut belum tersedia di sekolah baru.

Demikian pula terkait dengan pengadaan buku. Pada 2017, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura mengadakan penyediaan buku pelajaran untuk siswa SD dan SMP. Menurut pihak sekolah yang diwawancarai, pengadaan tersebut tidak melibatkan pihak sekolah. Pihak sekolah tidak ditanya perihal buku apa yang dibutuhkan. Tak hanya itu, sosialisasi mengenai pengadaan dan pemanfaatan buku juga tidak dilakukan.

Kedua, hasil PBJ belum dapat dimanfaatkan karena terdapat masalah berulang, yaitu konflik pembebasan lahan antara pemda dengan pemilik tanah dan kepala adat kampung yang di daerah Sentani disebut Ondoafi. Proses jual beli lahan harus juga disertai proses adat dan surat pelepasan adat dari Ondoafi.

Meski SDN 1 Sentani dan SMPN 1 Sentani saat ini sudah selesai dibangun, proses relokasi belum dapat dipindah. Akses masuk ke sekolah masih ditutup palang sehingga sekolah belum dapat dikunjungi. Pada perayaan ulang tahun sekolah, SMPN 1 Sentani mendapat bantuan tanaman dengan maksud untuk ditanam di sekolah baru. Namun, guru dan siswa disebut belum diizinkan masuk karena masih ada masalah pembebasan lahan.

Persoalan ini sangat disayangkan. Perluasan Bandara Sentani akan segera dimulai, sehingga siswa dan guru mau tidak mau harus segera pindah ke sekolah baru. Anggaran untuk

¹² Disampaikan oleh Kepala SMPN 1 Sentani dalam forum multi stakeholder meeting bersama ICW dan perwakilan Dinas Pendidikan, pada 19 Oktober 2021.

membangun dua sekolah tersebut juga tidak sedikit, Rp 7,3 miliar untuk perencanaan, pengawasan, dan pembangunan SDN 1 Sentani dan Rp 12,83 miliar untuk perencanaan, pengawasan, dan pembangunan SMPN 1 Sentani.

Ketiga, terdapat PBJ yang hasilnya belum bisa secara langsung dimanfaatkan karena tidak tepat waktu. Pengadaan buku pelajaran tahun 2017 semester 1 baru didistribusikan pada semester 2. Hal ini menyebabkan buku tidak dapat digunakan dan harus disimpan untuk tahun ajaran selanjutnya dan menjadi PR sekolah untuk menyimpan buku dalam jumlah banyak dengan aman. Tempat penyimpanan harus memperhatikan agar buku tidak lapuk/berjamur sehingga mengurangi kualitas buku yang berakhir pada tidak bermanfaatnya pengadaan buku yang dilakukan. Pengadaan dan distribusi buku sekolah yang tidak sesuai tahun ajaran sekolah ini kerap terjadi.

2.3.3. Kabupaten Merauke

Sepanjang 2017-2020 terdapat 20 paket pengadaan sektor pendidikan dengan metode tender di situs informasi tender LPSE Merauke. Total nilai kontrak pengadaan tersebut mencapai Rp 13,87 miliar. Informasi pengadaan sektor pendidikan di Merauke juga dapat dilihat dari fitur AMEL. Tak seperti Kabupaten Jayapura dan Sorong Selatan, SPSE Merauke telah diupdate ke versi 4.4 sehingga sudah tersedia fitur AMEL. Dari laman AMEL di LPSE Merauke diketahui terdapat 40 pengadaan di Dinas Pendidikan tahun 2019-2020. Namun, Informasi pengadaan di AMEL belum diketahui nilai kontraknya. Hanya tercantum pagu RUP.

Observasi hasil pengadaan sektor pendidikan di Merauke dilakukan terhadap dua pengadaan, yaitu pembangunan kantor SMPN 2 Muram Sari dan pembangunan ruang kelas di SMPN Urumb. Diadakan tahun 2020, informasi pengadaan SMPN Urumb belum tersedia dalam laman informasi tender/non tender di LPSE. Informasi pengadaan tersebut hanya ada di laman AMEL di LPSE. Informasi seperti nilai kontrak dan penyedia belum tertera dalam informasi pengadaan tersebut. Informasi masih sebatas nama proyek, Harga Perkiraan Sementara (HPS), metode pemilihan, dan tahun anggaran.¹³

Tabel 4.
Pengadaan Sektor Pendidikan di
Kabupaten Merauke yang Ditelusuri Hasilnya

No.	Paket Pengadaan	Lokasi	Tahun	Nilai Kontrak (Rp)	Penyedia
1	Pembangunan Kantor SMPN SATAP 2 Muram Sari	Kampung Muram Sari, Distrik Semangga	2017	Rp 629.355.683,31	CV. Marante

¹³ AMEL. *Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri Urumb* (link: <http://lpse.merauke.go.id/eproc4/amel/dashboard/paket/tracking?id=25908261>), diakses pada 10 Desember 2021 (09:10 WIB).

2	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN Urumb	Kampung Urumb, Distrik Semangga	2020	Rp 995.000.000,00 (HPS)	
---	-----------------------------------------	---------------------------------	------	-------------------------	--

Dua pengadaan infrastruktur pendidikan tersebut berada tidak jauh dari pusat Kabupaten Merauke. Meski lokasi tak sampai satu jam dari pusat pemerintahan daerah, perencanaan dan hasil pengadaan tak sepenuhnya baik. Terdapat pembangunan ruang kelas baru yang direncanakan kurang matang sehingga belum dapat digunakan hingga saat ini dan bangunan kantor sekolah yang tidak berkualitas baik.

Pembangunan ruang kelas baru di SMPN Urumb diusulkan pada 2019 oleh sekolah. Usulan tersebut disampaikan bersamaan dengan usulan rehabilitasi rumah guru, perpustakaan, dan laboratorium. Meski semua usulan belum terealisasi, sekolah cukup mengapresiasi Dinas Pendidikan karena usulan mereka langsung diakomodir, yaitu pada tahun anggaran 2020.¹⁴ Sekolah memahami ada faktor anggaran yang terbatas dan berharap kebutuhan infrastruktur lainnya akan dipenuhi pada tahun anggaran selanjutnya.

Namun, ruang kelas baru yang telah dibangun pada 2020 tersebut belum dapat digunakan karena belum dilengkapi dengan meubelair. Tidak adanya meubelair ini diduga dikarenakan dua hal. **Pertama**, ketidakpahaman sekolah mengenai PBJ. Sekolah tidak mengetahui bahwa pengadaan ruang kelas baru tidak satu paket dengan meubelair. Sekolah mengira ketika sekolah mengusulkan pembangunan ruang kelas, maka otomatis Dinas Pendidikan juga akan memberikan meubelair. Sebab, tidak mungkin ruang kelas baru dapat digunakan tanpa perangkat seperti meja, kursi, dan papan tulis.

Kedua, sikap pasif dari dinas pendidikan dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan mengevaluasi pemanfaatan PBJ. Ketika menerima usulan dari sekolah, Dinas Pendidikan seharusnya berkoordinasi dan mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Dengan demikian, Dinas Pendidikan tahu bahwa yang dibutuhkan sekolah tidak hanya ruang kelas, tetapi juga meubelair. Ketika pekerjaan sudah selesai, Dinas Pendidikan semestinya juga mengevaluasi apakah ruang kelas tersebut sudah dapat digunakan oleh sekolah.

Temuan lain mengenai PBJ sektor pendidikan di Merauke yaitu bangunan berkualitas kurang baik atau tidak tahan lama. Pada 2017, Dinas Pendidikan membangun kantor SMPN 2 Muram Sari. Pembangunan tersebut berdasarkan usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Kampung pada 2016. Anggaran yang dialokasikan cukup besar, yaitu Rp 629,3 juta. Namun, bangunan sudah mengalami kerusakan, seperti retak di beberapa bagian. Kerusakan bangunan bahkan sudah terlihat sejak satu tahun pasca dibangun.¹⁵ Alhasil, sekolah mengusulkan pengadaan rehabilitasi kantor sekolah sejak 2019.

¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan salah satu aparaturnya SMPN Urumb pada 31 Agustus 202 di SMPN Urumb, Merauke.

¹⁵ Ibid 12

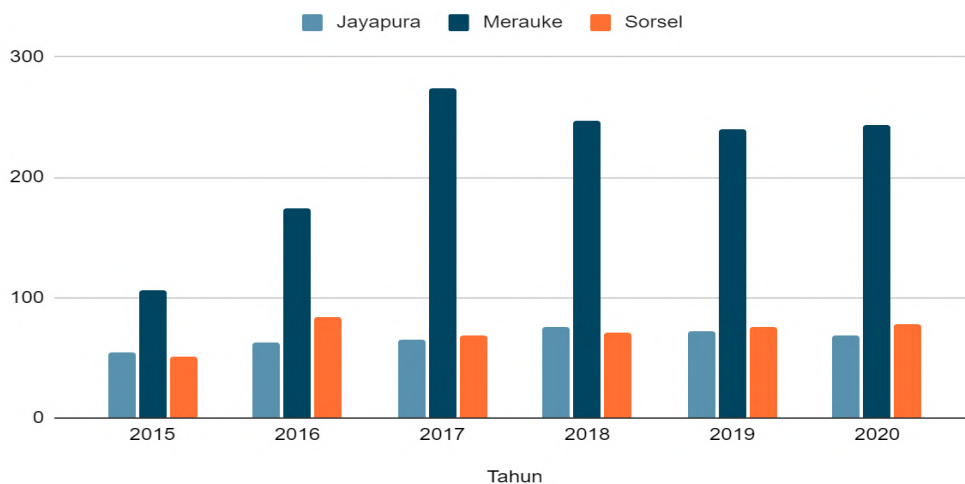
Terdapat pula keganjilan PBJ kantor sekolah ini. Pekerjaan konstruksi diduga dilakukan bukan oleh penyedia yang diumumkan dalam LPSE Merauke. Dalam LPSE, CV Marante tertera sebagai pemenang tender. Namun pekerjaan konstruksi diduga dilakukan oleh CV Papua Karya Konsulindo. Dalam dokumen gambar desain pembangunan tertulis bahwa pengadaan dilakukan dan ditandatangani oleh CV Papua Karya Konsulindo.

CV Papua Karya Konsulindo merupakan perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi. Melalui Opentender.net diketahui bahwa CV Papua Karya Konsulindo sepanjang 2016-2018 telah mendapatkan 15 paket pengadaan dari Pemda Merauke dan 1 paket pengadaan dari Kementerian Perhubungan dengan total nilai kontrak Rp 1,7 miliar untuk pekerjaan pengawasan, perencanaan, dan konsultasi.

2.4. PBJ Sektor Kesehatan

Anggaran berdampak besar pada pemenuhan pelayanan kesehatan. Bila melihat *mandatory spending* bidang kesehatan 2015-2020, belanja infrastruktur di Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Sorong Selatan mengalami tren peningkatan, terlebih di Kabupaten Merauke. Belanja infrastruktur Merauke mencapai Rp 274,4 miliar pada 2017. Namun, informasi pengadaan di LPSE dan Opentender sektor kesehatan hanya menunjukkan terdapat 16 pengadaan terkait pekerjaan infrastruktur dengan total nilai kontrak Rp 25,6 miliar. Adanya gap realisasi belanja dan publikasi membuat tak kalah penting melihat bagaimana anggaran yang terbatas ini dikelola. Penelitian ini menunjukkan adanya persoalan dalam PBJ sektor kesehatan.

Diagram 1.
Tren Belanja Infrastruktur Kesehatan
Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Sorong Selatan
Tahun 2015-2020



Sumber: Data Series Belanja Infrastruktur Kesehatan per 11 September 2020, Kemenkeu

2.4.1. Kabupaten Jayapura

Terdapat 33 pengadaan sektor kesehatan di Kabupaten Jayapura 2017-2020 dengan metode pengadaan lelang di LPSE dan Opentender.net. Jumlah pengadaan tersebut terhitung sangat minim. Padahal, dalam periode tahun yang sama, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura merencanakan 87 pengadaan sektor kesehatan sebagaimana tertera dalam SiRUP.¹⁶

Dari 33 pengadaan, 24 diantaranya akan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Dalam penelitian ini dipilih 4 pengadaan untuk dipantau, yaitu:

Tabel 5.
Pengadaan Sektor Kesehatan di
Kabupaten Jayapura yang Ditelusuri

No.	Nama Pengadaan	Tahun Anggaran	Nama Penyedia	Nilai Kontrak	Skor
1.	Pembangunan Puskesmas Sentani	2018	PT Puncak Berkah	Rp 5.500.930.000,-	57,14
2.	Pengadaan Obat Perbekalan Kesehatan	2019	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Rp 2.067.000.000,-	57,14
3.	Pengadaan Ruang Rawat Kelas 2 RSUD Yowari	2019	CV Sinar Sempurna	Rp 1.444.820.000,-	53,57
4.	Pengadaan Obat Perbekalan Kesehatan	2020	PT Tabi Anugerah Pharmindo	Rp 2.068.048.999,97	39,29

Pembangunan Puskesmas Sentani dan ruang rawat kelas 2 RSUD Yowari masuk dalam skor Opentender kategori resiko sedang terhadap kerentanan korupsi (41-70). PBJ ini dinilai cukup rentan diantaranya karena nilai kontrak yang relatif tinggi dan dimenangkan oleh perusahaan yang kerap mendapat proyek dari pemerintah. Dengan skor 57,14, pembangunan puskesmas pada 2018 bernilai kontrak Rp 5,5 miliar dan dimenangkan oleh PT Puncak Berkah. Dalam tahun yang sama, PT Puncak Berkah memenangi 3 pengadaan lain yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Papua, yaitu:

1. Pembangunan jalan dan jembatan ruas Jalan Yuwainda, Kali Pao senilai Rp 3.737.211.463,54.
2. Belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk barang/jasa dan biaya konstruksi fisik (36 keluarga) senilai Rp 2.542.700.000,-.
3. Pengembangan gedung SMA gabungan Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura senilai Rp 4.150.000.000,-.

¹⁶ sirup.lkpp.go.id, *Rencana Umum Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2017, 2018, 2019, 2020*, diakses pada 26 November 2021 (08.00 WIB).

Puskesmas Sentani telah selesai dibangun dan dapat dikatakan berkualitas baik. Namun, lokasi Puskesmas Sentani yang baru dipindah ke wilayah Kemiri dianggap jauh dari jangkauan masyarakat wilayah Hawaii. Puskesmas Sentani sebelumnya berada di Kota Sentani. Perpindahan puskesmas ini menjadi sorotan sejumlah masyarakat karena keberadaannya dinilai sangat dekat dengan RSUD Yowari.¹⁷ Persoalannya, jumlah puskesmas di Kabupaten Jayapura terbilang masih kurang. Berdasarkan data pusdatin Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hanya ada 20 puskesmas di Kabupaten Jayapura.¹⁸

Rencana mengobservasi hasil pembangunan ruang rawat di RSUD Yowari tidak terlaksana karena tidak mendapat izin dari RSUD Yowari. Pembatasan orang untuk memasuki RSUD Yowari tanpa keperluan mendesak disebabkan masih tingginya angka kasus Covid-19 dan RSUD Yowari termasuk dalam RS rujukan Covid-19 di Kabupaten Jayapura.

Sama dengan pembangunan Puskesmas Sentani, pembangunan di RSUD Yowari mendapat skor kerentanan korupsi kategori resiko sedang (53,57) di Opentender.net. Hal ini khususnya dikarenakan proyek dimenangkan oleh penyedia yang kerap memenangkan tender pemerintah, yaitu CV Sinar Sempurna. Terdapat 7 pengadaan infrastruktur lain yang dimenangkan CV Sinar Sempurna pada tahun 2019 senilai total Rp 28,7 miliar.

2.4.2. Kabupaten Merauke

Hanya terdapat 13 paket pengadaan sektor kesehatan dengan metode lelang tahun 2017-2020 di Merauke yang dipublikasikan di LPSE. Sedangkan di Opentender, jumlahnya terdapat 96 paket. Hanya 8 pengadaan yang sama-sama tercatat dalam dua kalin tersebut. Sedangkan dalam SiRUP, Dinas Kesehatan Merauke saja merencanakan 155 paket pengadaan untuk periode waktu tersebut. Rinciannya, 30 paket pada 2017, 49 paket pada 2018, 24 paket pada 2019, dan 52 paket pada 2020.¹⁹

Perbandingan data SiRUP dengan data realisasi pengadaan di LPSE Merauke sangat jauh. Hal ini mengindikasikan realisasi pengadaan di Merauke masih jauh dari yang direncanakan, khususnya tahun 2020. Bisa jadi, hal tersebut dikarenakan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 atau realisasi PBJ belum dipublikasikan di kanal LPSE.

Dari 102 paket yang direalisasikan (LPSE dan Opentender), 61 pengadaan penerima manfaatnya adalah masyarakat. Empat pengadaan dipilih untuk dipantau dalam penelitian ini. Lokasi pemantauan lapangan hasil PBJ dibagi menjadi 3 klaster wilayah guna memberi keragaman jarak lokasi PBJ dengan Ibukota Merauke. Klaster 1 adalah wilayah yang letaknya berada di ibukota, klaster 2 adalah wilayah yang berlokasi di pinggir kota, dan klaster 3 adalah wilayah yang letaknya diantara ibukota dan pinggir kota.

¹⁷ Jubi.co.id, *Puskesmas Sentani Pindah ke Kemiri Adalah Pilihan Terbaik* (link: <https://jubi.co.id/puskesmas-sentani-pindah-ke-kemiri-adalah-pilihan-terbaik/>), diakses 26 November 2021 (02.00 WIB).

¹⁸ Kemkes.go.id, *Data Dasar Puskesmas per Provinsi Tahun 2021* (link: <https://pusdatin.kemkes.go.id/folder/view/01/structure-data-dasar-puskesmas.html>), diakses pada 22 Desember 2021 (23.56 WIB).

¹⁹ sirup.lkpp.go.id, *Rencana Umum Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021*, diakses pada 12 Desember 2021 (22.00 WIB).

Tabel 6.
Pengadaan Sektor Kesehatan di
Kabupaten Merauke yang Ditelusuri Hasilnya

No	Sektor	Paket PBJ	Skor	Lokasi	Tahun
Cluster 1					
1	Kesehatan	Pembangunan Baru Puskesmas Rimba Jaya	43	Rimba Jaya Distrik Merauke	2018
Cluster 2					
2	Kesehatan	Pembangunan Baru Puskesmas Kumbe	60,71	Kampung Kumbe Distrik Malind	2018
3	Kesehatan	Penambahan Gedung Puskesmas Naukenjerai Prototype	50	Kampung Onggaya Distrik Naukenjerai	2017
Cluster 3					
4	Kesehatan	Penambahan Gedung Puskesmas Ulilin Prototype	60,71	Kampung Kumaaf Distrik Ulilin	2017

Empat pengadaan yang dipilih merupakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan puskesmas prototype dan puskesmas pembantu. Meski bersumber dari APBD, pembangunan puskesmas di Rimba Jaya dan Kampung Onggaya merupakan program bersama Kementerian Kesehatan. Diketahui bahwa Kabupaten Merauke mempunyai program membangun 12 puskesmas prototype pada 2017-2019. Namun diakses pada 12 Juli dan 21 Oktober 2022, informasi pengadaan 12 puskesmas prototype tersebut tidak ada di LPSE.

Dari sisi kualitas, bangunan puskesmas di Rimba Jaya dan Onggaya terlihat cukup baik. Namun pasca pembangunan puskesmas di Kampung Onggaya selesai, terdapat permasalahan pembebasan lahan. Sama halnya seperti di Jayapura, masalah pembebasan lahan kerap muncul dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan dalam perencanaan atau persiapan pembangunan. Masalah ini kemudian selesai dengan difasilitasi oleh kepala kampung.²⁰

Berbicara layanan, masyarakat mengaku cukup puas dengan pelayanan di Puskesmas Onggaya. Namun, terdapat kebutuhan mendesak yang belum tersedia, yaitu mobil jenazah. Masyarakat berharap, pemda kedepannya mengadakan mobil jenazah. Selama ini, kebutuhan tersebut cukup tinggi dan mobil ambulance, dijelaskan oleh pihak puskesmas, tidak dapat digunakan untuk mengangkut jenazah.

Meski tak mengetahui kanal LPSE dan SiRUP, masyarakat yang diwawancarai mengakui pembangunan puskesmas di kampung Rimba Jaya sudah transparan. Hal tersebut dikarenakan informasi dan perkembangan pembangunan diinformasikan melalui media sosial *Facebook*.

Pembangunan puskesmas di Rimba Jaya dan Kampung Onggaya dilakukan oleh perusahaan konstruksi nasional, PT Sinar Muara Bian. Pada tahun 2018 PT Sinar Muara Bian memenangkan 8 pengadaan terkait pekerjaan konstruksi dengan total nilai kontrak Rp 35,8 miliar di Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura. Sedangkan pada 2017 PT Sinar Muara Bian memenangkan 6 pengadaan dengan total nilai kontrak Rp 37,3 miliar.

²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kampung Onggaya, Bapak Marten R Teurupun, di Distrik Naukenjerai, pada 22 September 2021 (10.50-12.00 WIT).

Bangunan puskesmas di Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin, juga masih berkondisi baik setelah empat tahun dibangun. Pembangunan dilakukan oleh PT Tiga Bintang Papua Perkasa. Perusahaan ini memenangkan 5 proyek dengan total nilai kontrak Rp 25,4 miliar dalam periode tahun 2017.

Terdapat praktik baik di Distrik Ulilin yang penting diadopsi di daerah lainnya. Di distrik ini terdapat “sistem monitoring” pembangunan melalui pemerintah distrik. Terdapat pertemuan rutin yang disebut dengan forum keluarga besar Distrik Ulilin yang salah satunya membahas dan mensosialisasikan pembangunan di distrik tersebut. Selain pemerintah distrik, forum ini diikuti pihak pelayan kesehatan, pendidikan, keamanan (TNI dan Polri), pihak swasta (perusahaan), dan masyarakat. Forum ini dapat meningkatkan transparansi pembangunan dan pengawasan bersama.

Namun, terdapat hasil PBJ yang berkualitas buruk atau tidak tahan lama, yaitu PBJ pembangunan puskesmas prototype di Kampung Kumbe. Baru dibangun tahun 2018, puskesmas ini sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian. Padahal, nilai kontrak cukup fantastis, yaitu Rp 7,1 miliar. Puskesmas ini dibangun oleh PT Puncak Sejahtera Abadi, perusahaan konstruksi nasional di Kabupaten Merauke. Skor resiko korupsi di Opendender.net memang cukup rendah yaitu 36, meski anggarannya tinggi. Salah satunya dikarenakan pengadaan tidak dilakukan di akhir tahun melainkan pada bulan April.

Tren temuan di Merauke cukup berbeda dibanding di Sorong Selatan. Di Merauke, jauhnya jarak lokasi PBJ dari pusat kota tidak terlalu berpengaruh pada kualitas hasil PBJ. Hipotesis awal yaitu PBJ yang lokasinya jauh akan berkualitas kurang baik dibanding yang berlokasi dekat kota tidak sepenuhnya terbukti. Dalam pemantauan ini diketahui kualitas PBJ di klaster 1 dan 3 cukup baik sedangkan di klaster 2 tidak demikian.

2.4.3. Kabupaten Sorong Selatan

Perencanaan pengadaan di Dinas Kesehatan Sorong Selatan selama 2017-2020 berjumlah 91.²¹ Rinciannya, tahun 2017 tidak ada RUP (0), 2018 sebanyak 8 paket, 2019 sebanyak 57 paket, dan 2020 sebanyak 26 paket. Sedangkan realisasi pengadaan sebagaimana diketahui datanya dari Opendender dan LPSE Sorong Selatan hanya menampilkan 16 pengadaan. Hal ini menandakan PBJ di Sorong Selatan banyak tidak berjalan sesuai rencana atau terdapat pengadaan yang tidak dipublikasikan melalui situs LPSE.

13 dari 16 paket pengadaan (81,25%) teridentifikasi ditujukan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam penelitian ini ditelusuri 3 pengadaan sektor kesehatan yang penerima manfaatnya merupakan masyarakat. Untuk melihat pelayanan kesehatan di sejumlah kampung yang dari LPSE tidak diketahui ada tidaknya paket pengadaan di kampung tersebut, tim peneliti melakukan penelusuran terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kampung Bariat, Distrik Konda:

²¹ sirup.lkpp.go.id, *Rencana Umum Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021*, diakses pada 12 Desember 2021 (22.30 WIB).

Tabel 7.
Pengadaan Sektor Kesehatan di
Kabupaten Sorong Selatan yang Ditelusuri Hasilnya

No.	Nama Pengadaan	Lokasi	Tahun	Anggaran (Rp)	Penyedia
1	Penyediaan sarana air bersih Puskesmas Saifi	Distrik Saifi	2019	506.614.005,-	CV Putri Tunggal
2	Pembangunan baru Puskesmas Saifi	Distrik Saifi	2021	7.258.493.000,-	PT Tops Papua Jaya
3	Pembangunan Gedung / Relokasi DTPK Afirmasi Puskesmas Seremuk	Distrik Seremuk	2019	8.907.325.000,-	PT Tops Papua Jaya
4.	Pelayanan kesehatan di Kampung Bariat				

1. Penyediaan sarana air bersih di Puskesmas Saifi

Berlokasi di Kampung Kayabo, pengadaan penyediaan sarana air bersih di Puskesmas Saifi dengan anggaran Rp 500 juta memberikan hasil yang sangat tidak memuaskan. Dibangun 2019, kondisi saat ini hanya ada bak penampungan sumur tanpa mesin air sehingga bak hanya untuk menadah air hujan. Akibatnya puskesmas tidak beroperasi dan tidak terawat. Penyedia pengadaan adalah CV Putri Tunggal yang mendapat 40 proyek pada 2019 dengan total nilai kontrak Rp 39,9 miliar. Berlokasi di Bengkulu, CV Putri Tunggal memenangkan banyak pengadaan pemerintah yang berlokasi di wilayah timur Indonesia.

Sebagai proyek turunan Nawacita Presiden Joko Widodo dan merupakan program prioritas, penyediaan sarana air bersih yang gagal ini tentu sangat disayangkan. Dengan uraian pekerjaan dalam perencanaan pengadaan yakni pekerjaan pondasi, struktur kayu, dinding, dan atap, hasil pengadaan oleh CV Putri Tunggal seharusnya diperiksa dan diverifikasi oleh PPK dari dinas kesehatan. Selain mencegah hal serupa berulang, pemborosan uang negara juga dapat dicegah.

2. Pembangunan baru Puskesmas Saifi

Pelaksanaan pengadaan tahun 2021, pembangunan baru Puskesmas Saifi dilakukan oleh PT Tops Papua. Masih dalam proses pembangunan, puskesmas ini terlihat lebih besar dari puskesmas sebelumnya yang hanya berjarak 200 meter dengan masalah penyediaan bak penampungan air bersih. Gagalnya pengadaan oleh CV Putri Tunggal membuat pemerintah harus mengeluarkan kocek lagi untuk membangun puskesmas yang baru. Harapannya tentu dengan adanya puskesmas baru, pelayanan kesehatan akan lebih bagus dan tersedia air

bersih. Dalam data dasar puskesmas di Distrik Saifi, Sorong Selatan, Papua Barat hanya ada 1 puskesmas yang tergolong puskesmas sangat terpencil berdasarkan pusdatin Kemenkes²².

Dari situs Opendender.net diketahui bahwa PT Tops Papua memenangkan 30 proyek sepanjang 2017-2021 dengan total nilai kontrak Rp 198,61 miliar. Tidak hanya pengadaan di Sorong Selatan melainkan di Kabupaten Sorong, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Kabupaten Biak Numfor, Kota Jayapura, Universitas Sam Ratulangi Manado, dan Kementerian Agama. Perusahaan nasional ini semoga dapat membuat dan menghasilkan pembangunan puskesmas Saifi yang baru dengan lebih berkualitas sesuai dengan nilai kontraknya, Rp 7,2 miliar.

3. Pembangunan gedung/relokasi Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK) afirmasi Puskesmas Seremuk

Pembangunan gedung/ relokasi DTPK afirmasi Puskesmas Seremuk dilakukan oleh PT Tops Papua Jaya pada 2020. Dengan nilai kontrak Rp 8,9 miliar, puskesmas tampak bagus dengan sarana-prasarana berkualitas. Meski belum digunakan karena menunggu peresmian, pembangunan puskesmas afirmasi sangat dibutuhkan masyarakat Seremuk. Puskesmas Seremuk adalah puskesmas satu-satunya yang tergolong terpencil berdasarkan data yang ditampilkan pusdatin Kemenkes²³.

4. Pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kampung Bariat, Distrik Konda

Pemantauan yang dilakukan di Kampung Bariat Distrik Konda menemukan bahwa pelayanan kesehatan belum berjalan baik dan maksimal. Salah satu persoalan mendasar yang dikeluhkan warga adalah penyediaan air bersih. Warga menyebut bahwa dalam musrenbang dari tahun ke tahun telah mengusulkan penyediaan sarana air bersih. Namun hingga penelitian ini dilakukan, penyediaan sarana air bersih belum terealisasi.

Tidak segera disediakannya sarana air bersih mengakibatkan pada 2018-2019 terdapat 48 anak mengalami gizi buruk. Sulitnya pasokan air bersih diduga menjadi salah satu penyebab. Padahal jika melihat letak geografis, Distrik Konda hanya berjarak 8 km dari ibukota Kabupaten Sorong Selatan, Teminabuan. Terkenalnya Kabupaten Sorong Selatan sebagai "Negeri 1000 Sungai" sangat bertolak belakang dengan kondisi yang masih kekurangan air.

²² Kemkes.go.id, *Data Dasar Puskesmas per Provinsi Tahun 2021* (link: <https://pusdatin.kemkes.go.id/folder/view/01/structure-data-dasar-puskesmas.html>), diakses pada 23 Desember 2021 (00:27 WIB).

²³ Kemkes.go.id, *Data Dasar Puskesmas per Provinsi Tahun 2021* (link: <https://pusdatin.kemkes.go.id/folder/view/01/structure-data-dasar-puskesmas.html>), diakses pada 23 Desember 2021 (00:31 WIB).

BAB III. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian PBJ di Kabupaten Jayapura, Sorong Selatan, dan Merauke menunjukkan PBJ sektor pelayanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, di 3 daerah tersebut masih banyak persoalan. Terdapat 7 persoalan yang berdampak besar pada terhambatnya kemajuan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Persoalan ini juga menunjukkan ketidakefektifan penggunaan anggaran dan pengawasan, khususnya terkait bangunan-bangunan yang mangkrak tak bermanfaat. Persoalan ini penting menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Persoalan pertama yaitu ditemukan bahwa anggaran belum sepenuhnya direncanakan partisipatif dan didasarkan pada identifikasi kebutuhan penerima manfaat. Meski terdapat forum penyusunan anggaran *bottom up* melalui musrenbang dan pendataan kebutuhan melalui forum atau kanal khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat, masih terdapat penggunaan anggaran yang tak sesuai kebutuhan prioritas penerima manfaat.

Persoalan ini mengindikasikan belum baiknya sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan bukan semata-mata dikarenakan keterbatasan anggaran, tetapi juga perencanaan belanja yang tak bijak. Dengan anggaran yang terbatas di tengah tingginya kebutuhan, pemerintah daerah semestinya cermat merencanakan penggunaan anggaran. Jika sudah ada laboratorium yang belum dapat digunakan karena tidak dilengkapi peralatan setelah bertahun-tahun selesai dibangun, pemerintah mestinya mengadakan peralatan laboratorium. Bukan membuat pengadaan laboratorium baru dengan persoalan yang sama.

Kedua, PBJ masih dinilai kurang transparan oleh masyarakat dan penerima manfaat. Terdapat tiga turunan masalah mengenai isu transparansi ini, yaitu:

1. Sistem informasi yang dikembangkan LKPP dan dikelola oleh LPSE masing-masing daerah untuk mempublikasikan rencana dan realisasi PBJ belum banyak diketahui. Berbasis elektronik dan bergantung pada internet, strategi transparansi PBJ ini dinilai kurang efektif menjangkau masyarakat. Terlebih untuk mengaksesnya, dibutuhkan pula pemahaman pengoperasian.
2. Publikasi informasi realisasi PBJ dalam LPSE sangat minim. Dalam lima tahun terakhir, LPSE di 3 daerah sangat sedikit mempublikasi realisasi PBJ, baik tender dan non tender. Penelitian ini bahkan menemukan adanya pengadaan yang tidak diumumkan di LPSE, yaitu pengadaan PAUD di Kampung Bariat, Sorong Selatan, yang diduga dibangun pada 2016. Pengadaan 12 puskesmas prototype di Merauke tahun 2017-2019 juga tidak diinformasikan dalam LPSE Merauke.
3. Papan informasi proyek minimalis. Penerima manfaat kerap baru tahu ada proyek pembangunan ketika pembangunan dimulai. Adanya papan informasi proyek juga ditemukan tak banyak memuat informasi. Informasi nilai anggaran dan nama perusahaan pengawas proyek kerap tidak ditulis, seperti temuan terkait pengadaan pembangunan puskesmas pembantu di Kaiburse, Merauke. Padahal seharusnya papan proyek mencantumkan nama proyek, nomor kantor/perusahaan penyedia, asal anggaran, nominal anggaran, waktu pelaksanaan, dan nama perusahaan pengawas. Demikian pula dalam pengadaan non infrastruktur.

Masyarakat di sekitar lokasi PBJ juga menyayangkan tidak adanya sosialisasi PBJ, terlebih dalam pembangunan infrastruktur. Masyarakat menilai, sosialisasi tersebut penting agar masyarakat juga dapat ikut berperan, baik dalam pengawasan maupun untuk berkontribusi

dalam proses pembangunan, misalnya dilibatkan sebagai tenaga kerja atau tukang dan memaksimalkan produk lokal hasil usaha warga sekitar yang memenuhi spesifikasi.

Ketiga, adanya sejumlah hasil pekerjaan yang belum dapat dimanfaatkan karena mangkrak ataupun tidak dilengkapi sarana pendukung mengindikasikan kurangnya langkah monitoring dan evaluasi oleh OPD terkait. 3 dari 5 PBJ sektor pendidikan di Sorong Selatan yang ditelusuri hasil pembangunannya belum dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah menyebut selama ini tak ada penjelasan dari dinas pendidikan untuk menindaklanjuti ketidaksempurnaan hasil PBJ.

Keempat, dari observasi hasil pengadaan di sekolah-sekolah diketahui bahwa data kondisi sekolah dalam situs Sekolah Kita yang dikembangkan oleh Tim Dapodik Kemendikbud tak sepenuhnya valid. Data jumlah ruang kelas, ruang laboratorium, dan kondisi ruangan kerap tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Kemendikbudristek perlu menelusuri lebih jauh akar persoalannya. Apakah dikarenakan ketidakpahaman atau kesalahan input data di level sekolah atau ada persoalan lain? Situs ini juga penting mengakomodir ruang koreksi apabila pengakses data menemukan data yang tak valid dan selanjutnya memverifikasi. Hal ini penting mengingat data kondisi sekolah juga menjadi rujukan utama pembangunan sekolah.

Kelima, berdasarkan pemantauan hasil pengadaan di fasilitas kesehatan diketahui bahwa jumlah fasilitas kesehatan masih terbatas dan jauh dari jangkauan masyarakat. Kondisi ini selaras dengan data yang dimuat pusdatin Kementerian Kesehatan. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan yang berkualitas di Provinsi Papua dan Papua Barat haruslah menjadi prioritas pemerintah.

Keenam, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan manajemen SDM PPK di SKPD secara berkala. Dari hasil wawancara dan forum *multi stakeholders* diketahui bahwa PPK di Dinas Pendidikan dan Kesehatan banyak merangkap tugas dan tanggung jawab lainnya. Tidak adanya 1 orang yang fokus memasukkan data pengadaan ke sistem LPSE membuat data pengadaan tidak *update* secara berkala.

Ketujuh, belum tersedia kanal pengaduan efektif yang menghubungkan masyarakat dan penerima manfaat pengadaan dengan pemerintah daerah. Padahal, kanal pengaduan ini penting untuk memberikan ruang bagi masyarakat atau penerima manfaat pengadaan untuk sewaktu-waktu menyampaikan aduan atau usulannya kepada pemerintah daerah. Dengan adanya kanal pengaduan, wali murid, guru, atau bahkan siswa dapat melapor apabila pengadaan ruang kelas di sekolahnya mangkrak atau tidak berkualitas baik. Mereka tak perlu menunggu forum musrenbang ataupun forum reguler lain yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Dari temuan dan inventarisir masalah di atas, penelitian ini merekomendasikan:

1. Pemerintah daerah lebih partisipatif dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan anggaran, baik dengan memaksimalkan pelaksanaan musrenbang, maupun dengan mengidentifikasi kebutuhan penerima manfaat melalui forum dan kanal khusus.
2. Satuan kerja yang melakukan PBJ dan inspektorat perlu membangun mekanisme monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan pengadaan **serta** pemanfaatannya.
3. Pemerintah daerah meningkatkan transparansi PBJ dengan:
 - a. Memastikan realisasi PBJ segera dipublikasikan melalui situs LPSE. Sekretaris daerah dan BPBJ dalam hal ini perlu terlibat aktif dalam memastikan transparansi PBJ melalui LPSE, misalnya dengan mengeluarkan instruksi dan

- surat edaran yang memuat perintah publikasi, batas waktu, dan standar kelengkapan informasi yang perlu dipublikasikan.
- b. Transparansi tidak hanya mengandalkan sistem teknologi dan internet, tetapi juga sosialisasi PBJ kepada penerima manfaat dan pemerintah distrik serta kampung terkait.
 - c. Memastikan papan informasi pengadaan memuat informasi minimal yang perlu dipublikasi.
4. Inspektorat dan satuan kerja yang melakukan pengadaan dapat memanfaatkan *Opentender.net* untuk menentukan prioritas pengawasan PBJ. Salah satunya dengan melihat skor kerentanan korupsi yang dimuat dalam *Opentender.net*.
 5. Pemerintah daerah dan Kemendikbud memeriksa pembaruan dan ketepatan data kondisi sekolah di situs Sekolah Kita. Situs tersebut sebaiknya dilengkapi dengan fitur aduan yang memungkinkan publik memberikan informasi atau laporan kondisi *real* sekolah.
 6. Pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Jayapura, mengevaluasi ketersediaan layanan puskesmas dan memprioritaskan pembangunan puskesmas untuk menjawab keterbatasan jumlah puskesmas di Kabupaten Jayapura.
 7. Pemerintah daerah mengevaluasi manajemen SDM dan memastikan kecukupan sumber daya operator di tiap satuan kerja untuk menjamin pengelolaan informasi PBJ.
 8. BPBJ dan LKPP melakukan peningkatan kapasitas PPK di SKPD dalam hal pengelolaan PBJ.
 9. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kanal pengaduan yang mudah dan murah dijangkau masyarakat. Kanal yang paling sederhana misalnya dengan menyediakan *SMS/whatsapp/call center*. Kanal ini perlu dikelola dan dimonitor tindak lanjutnya oleh inspektorat bersama dengan pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Dalam konteks evaluasi pemanfaatan PBJ, website LPSE juga penting dikembangkan untuk menghimpun aduan publik. Misalnya dengan menambahkan fitur “komentar publik” di tiap laman informasi PBJ.

